

ZONA RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

Iswandi Umar¹⁾, Indang Dewata²⁾, Eri Barlian³⁾, Dedi Hermon⁴⁾

¹⁾ Jurusan Geografi FIS Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang (25174), iswandi_u@yahoo.com

²⁾ Ketua Busat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNP Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang (25174), i_dewata@yahoo.com

³⁾ Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNP Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang (25174), eri_barlian@yahoo.com

⁴⁾ Ketua Program S2 Magister Pendidikan Geografi UNP Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang (25174), dihermon@gmail.com

Abstract

Natural disasters will bring harm to human life, and one of the efforts to minimize that is with disaster mitigation. Determination of landslide hazard zones in settlement areas is part of mitigation efforts in the sustainable use of land resources. The purpose of this study is to map the landslide hazard zone in the settlement area in Tanah Datar District. For the determination of landslide hazard zone, an overlay method is used by scoring technique using geographic information system (GIS). The analysis shows that Tanah Datar District has 35,6 percent of high landslide hazard areas, and about 38 percent of settlement areas are in high landslide hazard zones.

Keywords: mitigation, landslide hazard, settlement area

PENDAHULUAN

Longsor merupakan suatu fenomena alam yang selalu berhubungan dengan datangnya musim hujan, terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat pada suatu tempat tertentu dengan tingkat kerusakan yang sangat berat, bahkan kehilangan nyawa penduduk yang bermukim di sekitarnya (Sitorus, 2006). Menurut Utoyo *et al.* (2001) dan Canuti *et al.* (2003), bencana longsor sering diakibatkan oleh karakteristik wilayah, juga disebabkan oleh aktivitas manusia dalam hal pemenuhan kebutuhannya tanpa memperhatikan keberlanjutan dari sumberdaya alam. Dewasa ini, bencana tanah longsor sering terjadi dan menghancurkan permukiman serta sarana dan prasarana lainnya. Hal ini menimbulkan kerugian harta dan jiwa penduduk yang bermukim pada daerah tersebut, sehingga perlu penataan kembali permukiman penduduk ke kawasan yang bebas longsor (Virdin, 2001; Syahrin, 2003; Suryani dan Marisa, 2005; dan Martono *et al.*, 2005).

Pembangunan yang pesat telah menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak ruang-ruang

alami untuk berubah fungsi (Pribadi *et al.*, 2006). Selain itu, Harun (1992) dan Kustiawan (1997) menjelaskan bahwa perubahan pola penggunaan lahan mengakibatkan terjadinya fluktuasi daya dukung sumberdaya lahan, sehingga menimbulkan terjadinya bencana tanah longsor (*landslide*). Buol *et al.* (1980) dan Darmawijaya (1990) menjelaskan bahwa longsor pada hakekatnya disebabkan oleh ketidakmampuan tanah menahan beban diatasnya karena tanah sudah mengalami degradasi sifat-sifat tanah.

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan BNPB (2012) menjelaskan bahwa rawan bencana merupakan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaera tertentu. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah atau meminimalisis dampak buruk dari bencana banir yakni melakukan mitigasi.

BPBD Kabupaten Tanah Datar mencatat adanya terjadi peningkatan bencana



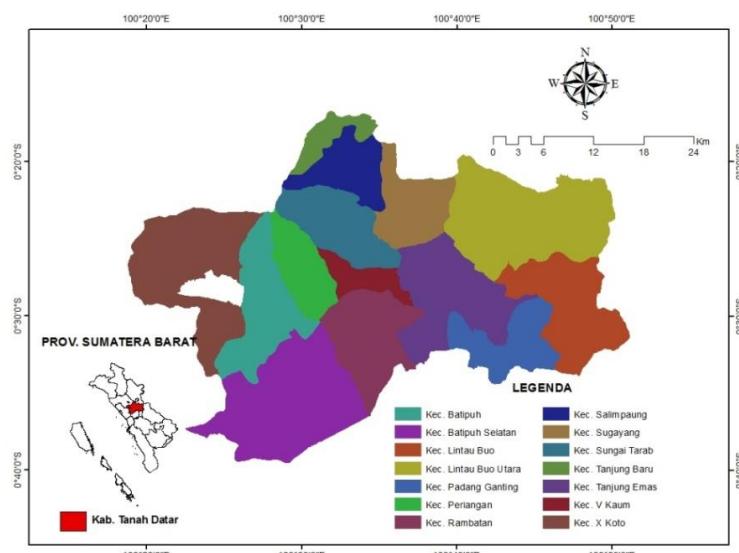
tanah longsor baik dari frekuensi maupun luasan yang terkena dampak pada periode 2000-2017. Salah satu bentuk mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko banjir dengan cara menentukan zona rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar berdasarkan karakteristik fisik memiliki wilayah yang sangat rawan untuk terjadi bencana tanah longsor, antara lain: a) secara morfologi kawasan tersebut sekitar 55 persen merupakan kawasan relatif datar (<27%); b) sekitar 70% kawasan Kabupaten Limapuluh Kota kawasan hutan primer beralih fungsi menjadi kawasan hutan sekunder; c) peningkatan intensitas curah hujan pada kawasan *uppar* DAS; dan d) semakin berkembangnya kawasan terbangun.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk menentukan kawasan rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, penelitian ini juga akan menentukan tingkat kerawanan permukiman dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis lokasi penelitian terletak pada bujur $100^{\circ}18'BT - 100^{\circ}50'BT$ dan lintang $0^{\circ}18'LS - 0^{\circ}40'LS$. Penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, yakni pada bulan Juni – Oktober 2017.



Gbr 1. Lokasi penelitian

Matrik jenis dan sumber data penelitian

Jenis data	Sumber
Peta lereng	Citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)1 Arc Second
Peta jenis tanah	Peta Jenis Tanah (PPT) Bogor tahun 1990 skala 1 : 250.000
Peta sistem aliran/ landsystem	Regional Physical Planning Program for Transmigration tahun 1990 skala 1 : 250.000
Data curah hujan	BMKG Sicin periode 1975-2017
Peta geologi	Badan Geologi Bandung tahun 2007 skala 1 : 250.000
Peta pemanfaatan lahan	Landsat 7+ETM tahun 2016 dan dikoreksi dengan citra Quick Bird 0.65m tahun 2010.
Elevasi	Citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)1 Arc Second

2.2 Jenis dan sumber data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari pengukuran dan pengumpulan dari lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, informasi,

dan catatan resmi yang berasal dari berbagai instansi terkait. Tabel 1 disajikan matrik jenis dan sumber data.

2.3. Teknik analisis data pelitian

Tana pendleton GIS long pers.

Zona rawan longsor di Kabupaten Tarah Datar ditentukan dengan menggunakan pendekatan sistem informasi geografi yakni metode tumpang susun/*overlay*. Dalam analisis overlay menggunakan *software* ArcGIS 10.1. Untuk penentuan tingkat rawan longsor ditentukan dengan menggunakan persamaan 1. Dalam persamaan 1 zonasi

Dimana

- : Geomorfologi Dimana :
- : Tingkat rawan longsor
- : Curah hujan
- : Jenis tanah
- : Geologi
- : Penggunaan lahan
- : Lereng

Tabel 2 Indikator rawan longsor

	Indikator	Sub Indikator	Harkat
Jenis Tanah	Andosol		1
	Latosol		2
	Podsolik		3
Lereng	0-8 persen	Datar	1
	8-14 persen	Landai	2
	15-25 persen	Agak Curam	3
	25-40 persen	Curam	4
	> 40 persen	Sangat curam	5
Geomorfologi	Denudasional		2
	Fluvial		1
	Karst		2
	Volkanik		4
Geologi	Aluvium		1
	Batuhan		
	ganung api		3
	Batuhan intrusi		3
Curah Hujan (mm/tahun)	Batuhan		
	metamorf		3
	Batuhan kapur		2
	Formasi		
Penggunaan lahan	branin		3
	Formasi		
	kuantan		3
	Formasi		
a. Pengutipan	ombilin		3
	Formasi		
	sangkarewang		3
	Formasi tuhur		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau	2500-3000		1
	3000-3500		2
	3500-4000		3
	4000-4500		4
	4500-5000		5
	> 5000		6
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.			
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penusaan karya ilmiah per-			
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.			
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk karya tulis ini dalam bentuk:			

kawasan longsor ditentukan dengan mempertimbangkan enam indikator yakni, jenis tanah, lereng, tipe geologi, proses geomorfologi, curah hujan, dan penggunaan lahan (Tabel 2). Masing-masing indikator diurai dalam beberapa sub indikator dengan nilai harkat yang berbeda.

Sumber : MAFF-Japan (Zain 2002) dan Hermon 2017

Selanjutnya, untuk penentuan kelas interval menggunakan persamaan 2. Total skor tertinggi tingkat rawan longsor (TRL) sebesar 4,1 sedangkan total skor terendah sebesar 1,1. Zona rawan longsor dibedakan atas tiga kelas yakni zona rawan tinggi, zona rawan sedang, dan zona rawan rendah. Tabel 3 disajikan kelas interval zona rawan longsor.

Tabel 3 : Kelas interval zona rawan longsor

Kelas Kerawanan	Kelas Interval	Indeks Kerawanan
Kelas rendah	1,00-2,00	Zona rawan rendah
Kelas sedang	2,01-3,00	Zona rawan sedang
Kelas tinggi	3,01-4,01	Zona rawan tinggi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Christiadi (2006) tanah longsor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi geologi, hidrologi, topografi, iklim, dan penggunaan lahan. Wilayah dengan Karakteristik lereng yang curam akan rawan terjadi longsor bila faktor curah hujan yang tinggi serta pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol. Kabupaten Tanah Datar memiliki

$$I = \frac{c-b}{k} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana

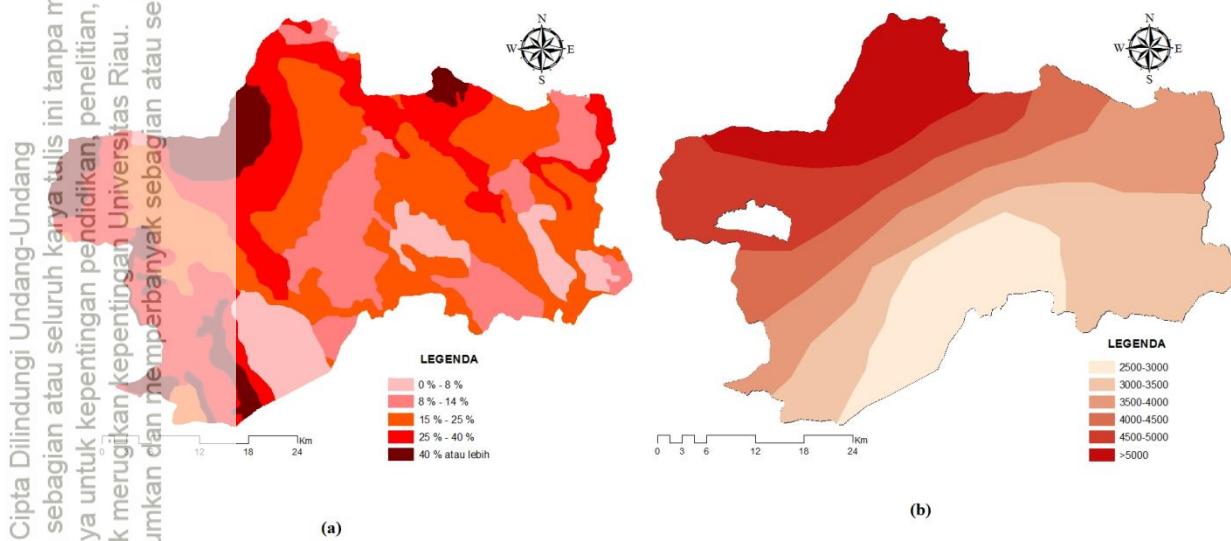
I : besar jarak interval kelas

c : jumlah skor tertinggi

b : jumlah skor terendah

k : jumlah kelas yang diinginkan

wilayah yang relatif bergelombang, sekitar 55 persen wilayahnya dengan lereng kategori agak curam sampai sangat curam. Hanya sekitar 20 persen wilayah tersebut dengan lereng relatif datar. Selain itu, berdasarkan tingkat curah hujan wilayah penelitian memiliki rata-rata curah hujan 3000-3500 mm/tahun. **Gambar 2** disajikan peta lereng dan curah hujan pada Kabupaten Tanah Datar.



Gbr 2. Peta lereng (a) dan peta curah hujan (b) Kab. Tanah Datar

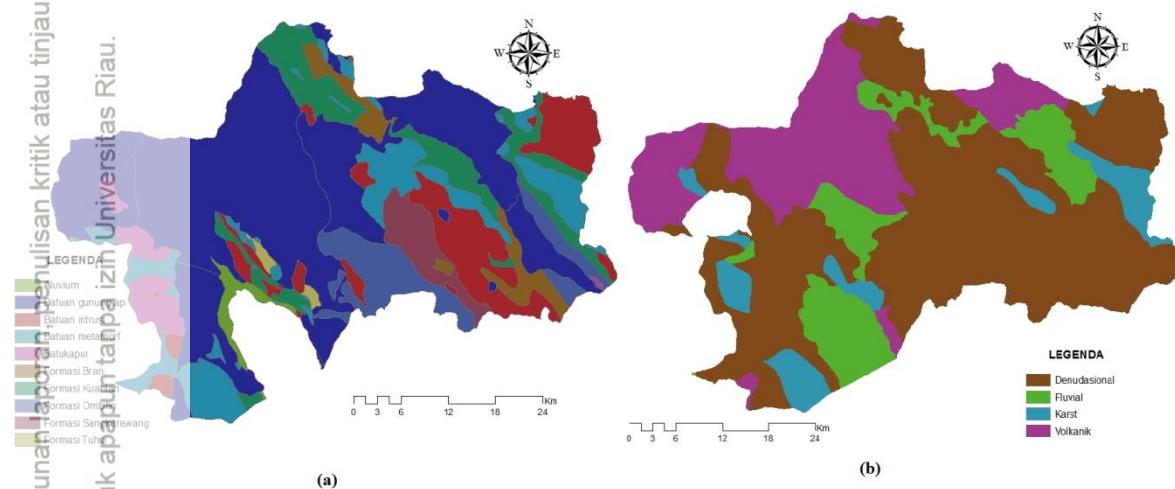
Kabupaten Tanah Datar berdasarkan geologi sebagian besar terbentuk oleh batuan gunung api. Gunung Merapi pada bagian barat memiliki peran penting dalam pembentukan

geologi Kabupaten Tanah Tanah. Selain itu, patahan Semangko membentuk perubahan dan perombakan wilayah tersebut. Secara geomorfologi proses denudasional sebagian

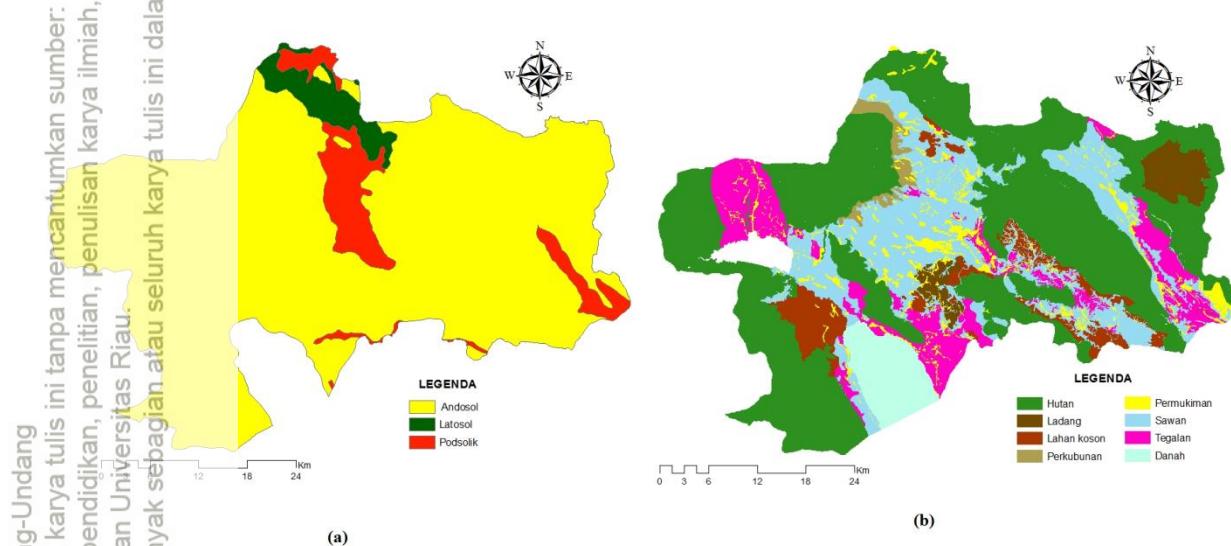


besar mempengaruhi proses pembentukan wilayah tersebut. **Gambar 3** disajikan peta

geologi dan geomorfologi Kabupaten Tanah Datar.



Gbr 3. Peta geologi (a) dan peta geomorfologi (b) Kab. Tanah Datar



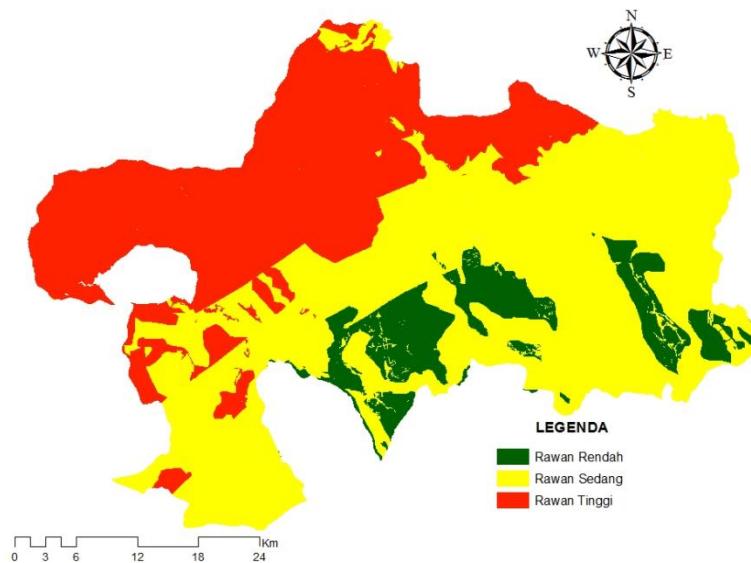
Gbr 4. Peta jenis tanah (a) dan peta penggunaan lahan (b) Kab. Tanah Datar

hutan. Namun peningkatan jumlah manusia akan mendesak perluasan kawasan terbangun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat sekitar 35,6 persen wilayah dengan tingkat kerawanan longsor tinggi, sebesar 54,4 persen tingkat kerawanan sedang, dan sisanya sekitar 10 persen merupakan zona rawan rendah. Hal ini dapat berarti bahwa Kabupaten Tanah Datar sebagian besar merupakan wilayah rawan bencana longsor. Zonasi kawasan rawan

longsor di Kabupaten Tanah Datar disajikan

pada **Gambar 5**.



Gbr 5. Peta zona rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar

Kawasan permukiman pada Kabupaten Tanah Datar selalu mengalai perkembangan setiap tahunnya. Persentase pertumbuhan kawasan permukiman pada periode 2000-2016 sebesar 1,3 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan kawasan permukiman berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Data BPS Tanah Datar (2016) persentase pertumbuhan penduduk pada wilayah penelitian sebesar 0,33 persen/tahun. Menurut Umar dkk (2017) pemanfaatan lahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pemanfaatan lahan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah manusia di bumi. Semakin banyak jumlah manusia yang menghuni permukaan bumi, maka semakin tinggi kebutuhan untuk pemanfaatan lahan. Sedangkan lahan yang tersedia untuk dampat memenuhi kebutuhan manusia bersifat terbatas. Selain itu, Sadyohutomo (2008) menambahkan bahwa keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia

menyebabkan terjadiknya konflik antar pengguna lahan. Selain itu, Muata,ali (2012) menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk menyebabkan manusia memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Sebagai akibatnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan bencana alam.

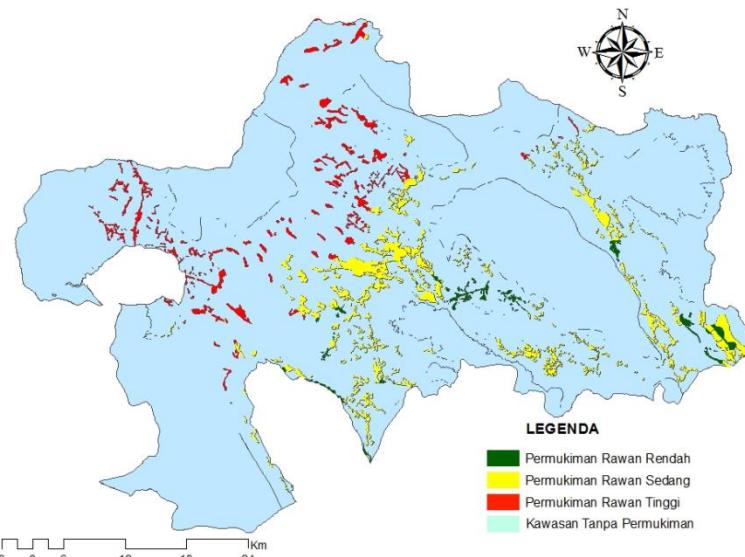
Gambar 6 merupakan *overlay* antara zona rawan longsor dengan penggunaan lahan untuk kawasan permukiman tahun 2016 di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa sekitar 28,23 persen kawasan permukiman berada pada zona sangat rawan bencana longsor, sekitar 63,36 persen kawasan permukiman kategori rawan sedang, dan sekitar 8,4 persen sisanya berada pada zona rawan rendah. Berdasarkan analisis diatas dapat diartikan bahwa sebagian besar kawasan permukiman memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana longsor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penggunaan perumahan rawan longsor
dapat mengakibatkan bencana tanah longsor
a. Pengertian hukum
b. Pengembangan kawasan rawan longsor

REFERENSI

1. Diliang, S., dan Putus, S.R.P., 2006, Pengembangan Lahan Berpenutupan Tetap sebagai
2. Diliang, S., dan Putus, S.R.P., 2006, Pengembangan Lahan Berpenutupan Tetap sebagai



Gbr 6. Peta zona permukiman rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar

4. KESIMPULAN

Kabupaten Tanah Datar merupakan Kawasan yang memiliki topografi relatif kasar dengan curah hujan yang tinggi. Konsistensi wilayah tersebut berdampak terhadap bencana tanah longsor. Kabupaten Tanah Datar memiliki sekitar 35,6 persen wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Kawasan permukiman pada periode 2000-2016 memiliki perkembangan kawasan permukiman sekitar 60 persen/tahun. Peningkatan kebutuhan lahan permukiman berdampak terhadap berkembangnya kawasan pada zona rawan longsor. Sekitar 28,23 persen kawasan permukiman terdapat pada zona rawan tinggi. Oleh karena itu, maka perlu upaya mitigasi dan pembatasan perizinan untuk pengembangan kawasan pada zona rawan longsor.

Ucapan terima kasih kepada PPKLH, Program Studi Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana UNP, dan S2 Magister Pendidikan Geografi FIS UNP yang telah membantu dan menfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kontrol terhadap Faktor Resiko Erosi dan Bencana Longsor, Makalah, *Lokakarya Penataan Ruang sebagai Wahana untuk Meminimalkan Potensi Kejadian Bencana Longsor*, Jakarta, 7 Maret 2006

- [2] Utoyo, B.S., Anwar, E., Sandy I.M., Saefulhakim, R.S., dan H. Santoso., 2001, Analisis Keterkaitan antara Pertumbuhan Wilayah dengan Pola Perubahan Struktur Penggunaan Lahan, *Forum Pasca Sarjana*, 24, 159-162
- [3] Canuti, P., N.Casagli, and R. Fanti, 2003, Landslide Hazard for Archaeological Heritage, The Case of Tharros in Italy. *Landslides News*, 14/15, 40-43
- [4] Virdin, J.W, 2001, Understanding the Synergies between Climate Change and Desertification, UNDP
- [5] Syahrin, A., 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press
- [6] Suryani, R.L., dan A. Marisa, 2005, *Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Masalah Permukiman di Perkotaan*. Program Studi Arsitektur. Fakultas Teknik USU, Medan
- [7] Martono, D.N., Surlan, dan B.T. Sukmana, 2005, Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penitisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karyatulis dengan cara menambahkan sumber.

- Perencanaan Tata Ruang di Indonesia.
<http://io.ppi.jepang.org/article>
- [8] Pribadi, D.O., Shiddiq D., dan Ermyanila M., 2006, Model Perubahan Tutupan Lahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, *Jurnal Teknologi Lingkungan*. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan, 7, 35-61
- [9] Hatun, U.R., 1992, Dinamika Penggunaan Sumberdaya Lahan di Jawa Barat 1970-1990, *Jurnal PWK*, 3, 48-53
- [10] Buel, S.W., F.D. Hole., and R.J. Cracken., 1980, *Soil Genesis and Classification*, Second Edition, The Iowa State University Press. Amess
- [11] Darmawijaya, M.I., 1990, *Klasifikasi Tanah*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- [12] [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012, *Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Nomor 2 Tahun 2012*.
- [13] Zain, A.F.M., 2002, Distribution, Structure dan Function of Urban Green Space in Southeast Asian Mega-Cities with Special Reference to Jakarta
- [14] Metropolitan Region (JABOTABEK). Doctoral Degree Program. Department of Agricultural and Environmental Biology Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan
- [15] [BPS] Badan Pusat Statistik Tanah Datar, 2016, *Tanah Datar dalam Angka*.
- [16] [BPBD] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Datar, 2017, *Statistik Bencana Daerah*.
- [17] Umar, I., Widiatmaka, Pramudya, B., dan Barus, B., 2017, Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Permukiman dengan Pendekatan MCE di Kota Padang, *Jurnal PSL*, 2 (2), 84-95
- [18] Hermon, D., 2017, *Geografi Bencana*, Rajawali Press. Jakarta
- [19] Kustiawan, I., 1997, Permasalahan Konversi Lahan Pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang Wilayah. Studi Kasus, Wilayah Pantura Jawa Barat, *Jurnal PWK*, 8: 49-60
- [20] [RI] Republik Indonesia, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.